



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA, PARIWISATA,  
EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2018 - 2019.
Masa Persidangan ke-	: I (Satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: Eselon I Bekraf RI: 1. Wakil Kepala; 2. Sekretaris Utama; 3. Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan; 4. Deputi Akses Permodalan; 5. Deputi Infrastruktur; 6. Deputi Pemasaran; 7. Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi; 8. Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah.
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 24 September 2018.</b>
Pukul	: <b>13.00 WIB s/d selesai.</b>
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: <b>DR.Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua</b> Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh., S.Sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>1. Pendalaman RKA K/L TA 2019; dan</b> <b>2. lain-lain.</b>
Hadir	: 32 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: <b>1. Ricky Pesik (Wakil Kepala);</b> <b>2. Restog Krisna Kusuma (Sekretaris Utama);</b> <b>3. Abdur Rohim Boy Berawi (Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan);</b> <b>4. Fadjar Hutomo (Deputi Akses Permodalan);</b> <b>5. Hari Santosa Sungkari (Deputi Infrastruktur);</b> <b>6. Joshua Puji Mulia Simandjuntak (Deputi Pemasaran);</b> <b>7. Ari Juliano Gema (Deputi fasilitas HKI dan Regulasi);</b> <b>8. Endah Wahyu Sulistianti (Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah).</b>

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.55 WIB oleh DR. Ir. Djoko Udjiyanto, M.M./Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari masing-masing pejabat eselon I Bekraf RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

### A. Pendalaman RKA/KL TA 2019.

Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN TA 2019 dan RDP Komisi X DPR RI dengan Kepala Bekraf RI tanggal 5 September 2018, Pagu Anggaran (Sementara) Bekraf RI pada RAPBN TA 2019 sebesar **Rp657.151.214.000,-** (*enam ratus lima puluh tujuh miliar seratus lima puluh satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah*) yang dialokasikan untuk:

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU ANGGARAN TAHUN 2019
<b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya</b>		<b>173.868.667.000</b>
<b>Pengembangan Ekonomi Kreatif</b>		<b>483.282.537.000</b>
1.	Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan	92.702.922.000
2.	Deputi Akses Permodalan	47.270.569.000
3.	Deputi Infrastruktur	125.104.470.000
4.	Deputi Pemasaran	133.489.029.000
5.	Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi	52.429.690.000
6.	Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah	32.285.857.000
TOTAL		<b>657.151.214.000</b>

Selanjutnya masing-masing unit kerja Bekraf RI menyampaikan paparan dan penjelasan sebagai berikut:

1. **Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan** menyampaikan paparan dan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Keluaran	Target	Lokasi Kegiatan
Pengembangan Big Data Ekonomi Kreatif	2 Database	Pusat
Ditektori data dan Pusat unggulan Ekraf	1 Direktori Data	Pusat
Edukasi SDM Ekraf melalui IKKON, Coding Mum dan lain-lain	11.200 orang	28 Provinsi

2. **Deputi Akses permodalan** menyampaikan paparan dan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Keluaran	Target	Lokasi kegiatan
Pelaku Ekraf yang mendapat bimbingan teknis akses permodalan	2.775 orang	20 Provinsi
Peningkatan Permodalan untuk pelaku Ekraf pada akses non perbankan	245 Miliar	9 Provinsi di Indonesia 3 Negara ( <i>India, Amerika Utara dan Korsel</i> )
Peningkatan Permodalan untuk pelaku Ekraf pada akses perbankan	4.840 Miliar	19 Provinsi

3. **Deputi Infrastruktur** menyampaikan paparan dan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Keluaran	Target	Lokasi Kegiatan
Fasilitasi peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur fisik bagi pelaku Ekraf	16 Unit	12 Provinsi
Pelaku Ekraf yang mendapatkan fasilitas infrastruktur fisik	2.250 Orang	15 Provinsi
Fasilitasi peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur TIK bagi pelaku Ekraf	7.500 Orang	11 Provinsi
Fasilitasi pre-star up	150 Orang	10 Kab/Kota

4. **Deputi Pemasaran** menyampaikan paparan dan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Keluaran	Target	Lokasi Kegiatan
Pelaku Ekraf yang mendapatkan fasilitasi promosi dalam negeri	2.050 orang	15 Provinsi
Fasilitasi produk Ekraf di pameran/roadshow luar negeri (produk)	25 Produk	DKI Jakarta, Bali, London, Amerika Utara, dan Eropa Barat

5. **Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi** menyampaikan paparan dan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Keluaran	Target	Lokasi Kegiatan
Fasilitasi pengakuan HKI bagi pelaku Ekraf	1.875 Produk	23 Provinsi
Pelaku Ekraf yang mendapat bimbingan teknis dan workshop HKI	2.250 Orang	15 Provinsi 1 Luar negeri (Eropa Barat)
Fasilitasi sertifikasi profesi bagi pelaku Ekraf	3.000 Orang	13 Provinsi
Penyusunan RUU Ekraf	1 Naskah	Pusat

6. **Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah** menyampaikan paparan dan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Keluaran	Target	Lokasi Kegiatan
Kerjasama yang dioperasikan di Dalam Negeri (kerjasama)	9 Kerjasama	4 Provinsi
Kerjasama yang dioperasikan di Luar Negeri (kerjasama)	8 Kerjasama	5 Provinsi 6 di Luar Negeri

7. **Sekretaris Utama** menyampaikan paparan dan penjelasan program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dalam bentuk:

- Peningkatan pengelolaan Bekraf dengan target Opini Laporan Keuangan Bekraf RI oleh BPK, dengan target predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Pembangunan/pengadaan tahap awal gedung Bekraf

## B. USULAN TAMBAHAN

Kepala Bekraf RI telah mengirimkan surat kepada Pimpinan Komisi X DPR RI pada tanggal 6 September 2018, perihal permohonan Tambahan Alokasi Anggaran TA 2019 sebesar Rp101.500.000.000 (*seratus satu miliar lima ratus juta rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	PAGU ANGGARAN TAHUN 2019	USULAN KEGIATAN	USULAN TAMBAHAN ANGGARAN	JUMLAH
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	173.868.667.000	Peningkatan Kapasitas SDM di Lingkungan Bekraf	25.000.000	198.868.677.000
Pengembangan Ekonomi Kreatif	483.282.537.000		76.500.000	559.782.537.000
Deputi Riset Edukasi dan Pengembangan	92.702.922.000	Penyusunan Lagu Destinasi	6.000.000	98.702.922.000
Deputi Akses Permodalan	47.270.569.000	Go Start-Up Indonesia	5.500.000	52.770.569.000

PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUT	PAGU ANGGARAN TAHUN 2019	USULAN KEGIATAN	USULAN TAMBAHAN ANGGARAN	JUMLAH
Deputi Infrastruktur	125.104.470.000	Pembangunan Misbar	11.000.000	136.104.470.000
Deputi Pemasaran	133.489.029.000	1. Pasar Seni 2. Kampanye Produk Kreatif dalam dan Luar Negeri	26.000.000	159.489.029.000
Deputi Fasilitas HKI dan Regulasi	52.429.690.000	1. Fasilitas Sertifikasi Profesi. 2. Fasilitas Indikasi Geografis	10.000.000	62.429.690.000
Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah	32.285.857.000	1. Travel Grant 2. MoU, Optimalisasi Satu Pintu, Sosialisasi Rindekraf dan Roadmap Rindekraf	18.000.000	50.285.857.000
<b>TOTAL</b>	<b>657.151.214.000</b>		<b>101.500.000</b>	<b>758.651.214.000</b>

### C. SIKAP DAN PANDANGAN KOMISI X DPR RI.

1. Komisi X DPR RI masih membutuhkan penjelasan lebih rinci mengenai program kerja masing-masing unit kerja Badan Ekonomi Kreatif RI pada RAPBN TA 2019, sehingga Bekraf RI perlu memperbaiki paparan dan penjelasan mengenai rincian anggaran (dalam pagu anggaran sebesar 657.151.214.000, sementara rincian per unit kerja jika ditotal menjadi 656,9 M), dengan memperhatikan catatan sebagai berikut:
  - a. Sebaran program dan kegiatan Bekraf RI harus mempertimbangkan proporsionalitas dan keadilan diseluruh wilayah di Indonesia dalam rangka pencapaian serapan anggaran, sehingga mampu mengoptimalkan potensi-potensi ekraf di daerah, yang disesuaikan dengan renstra Bekraf RI.
  - b. Selain 3 produk unggulan (Kriya, Kuliner dan Fesyen) dan produk prioritas (Film, Animasi dan Video, Aplikasi dan Game, dan Musik), Bekraf RI perlu memaksimalkan sub-sektor lainnya dari 16 sub-sektor yang diamanatkan Perpres No. 72 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.6 Tahun 2015 Tentang Bekraf.
  - c. Mempertimbangkan program-program di K/L lain mengenai bidang ekonomi kreatif, agar program dan kegiatan Bekraf tidak tumpang tindih dengan program dan kegiatan K/L lainnya.
  - d. Cakupan lokasi kegiatan target kerjasama agar diperluas lebih dari 4 provinsi, sehingga menjangkau daerah-daerah prioritas.
2. Mengenai usulan tambahan anggaran Bekraf RI sejumlah **Rp101.500.000.000** (*seratus satu miliar lima ratus juta rupiah*) pada RAPBN TA 2019, Komisi X DPR RI meminta kepada Bekraf RI untuk memperbaiki dan menyusun kembali rincian usulan kegiatan tambahan, dengan memperhatikan arah dan fokus program dalam lingkup Badan Ekonomi Kreatif.

3. Terkait perbaikan paparan sebagaimana dimaksud C.1 dan C.2, Komisi X DPR RI meminta Bekraf RI menyampaikannya paling lambat tanggal 27 September 2018.

**D. LAIN-LAIN**

Komisi X DPR RI mendorong Bekraf RI untuk melakukan koordinasi dengan K/L lain terkait percepatan pembahasan RUU Tentang Ekonomi Kreatif.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul **16.08** WIB.

**KETUA RAPAT,**



DR.IR. DJOKO UDJIANTO,M.M.